

**PENGARUH ATRIBUT *CORPORATE*  
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN  
*INTELLECTUAL CAPITAL***



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ARISTYA KARTIKASARI**

**NIM. 12030111120008**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Aristya Kartikasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120008  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH ATRIBUT *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP  
PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL*  
*CAPITAL***  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt.

Semarang, 26 Januari 2015

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt.

NIP. 19620416 198803 1003

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Aristya Kartikasari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120008

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH ATRIBUT *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP  
PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL*  
*CAPITAL***

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Maret 2015**

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt. (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
3. Drs. M. Didik Ardiyanto, M. Si, Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aristya Kartikasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Atribut *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

Aristya Kartikasari

NIM. 12030111120008

## **ABSTRACT**

*The aims of this study is to examine the influence of corporate governance attributes like board size, independent non-executive directors, family members on the board, board meetings, managerial ownership, government ownership and institutional ownership on intellectual capital disclosure. Firm size, profitability, and leverage used as control variable.*

*The population in this study consists of all listed firms in Indonesia Stock Exchange in year 2011, 2012, and 2013. Sampling method used is purposive sampling. A criterion for firm which have a high level of market capitalization. Another criteria is the firm must have complete data on implementation of corporate governance, total data of this study is 89 data. Then, there is one sample that include outlier should be excluded from samples of observation. So, the final amounts of the sample are 88 data. Multiple regression used to be analysis techniques.*

*The empirical result of this study show that board size, board meetings, managerial ownership, government ownership and institutional ownership have positively significant influence on intellectual capital disclosure. Independent non-executive directors and family members on the board have no significant influence to intellectual capital disclosure.*

**Keywords:** *intellectual capital disclosure, corporate governance, ownership structure patterns, annual reports, Indonesia.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atribut *corporate governance*, seperti ukuran dewan, komisaris independen, anggota keluarga di dewan, rapat dewan, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi. Perusahaan yang dijadikan sampel harus memiliki data lengkap mengenai pelaksanaan *corporate governance*, sehingga jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 89 data. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 1 data outlier yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 88 data. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel komisaris independen dan hubungan keluarga di dewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Kata kunci: Pengungkapan *intellectual capital*, *corporate governance*, pola struktur kepemilikan, laporan tahunan, Indonesia.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

(QS. Al Insyirah: 5-8)

*“If you can dream it, you can do it.”*

(Walt Disney)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Kedua orang tua dan adik-adikku tercinta

Keluarga Akuntansi UNDIP 2011

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PENGARUH *ATRIBUT CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL*” dengan lancar dan tepat waktu, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Ibu Aditya Septiani, S.E, M.Si.,Akt. selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan yang diberikan.
4. Mas Andrian Budi Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. dan mas Candra Halim Ash Shiddiq, S.E yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi dan selama perkuliahan ini.

5. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Heru Susanto, S.Pd dan Ibu Umayati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, do'a, kesabaran, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
7. Adik-adik penulis, Ardiana Dwi Hapsari dan Arsatria Farhan Cholilir Rohman yang selalu memberikan motivasi, do'a dan kasih sayangnya.
8. Keluarga besar Hartoyo yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi.
9. Sahabat-sahabat terbaik sepanjang masa, Anastasia Dewi Nur Komaria, Dwi Monika Sari, dan Alit Verfitasari Aryaningrum untuk kasih sayang, kebersamaan, keceriaan, dan semangat yang diberikan.
10. Keluarga kedua di Semarang, mb Ulfa Khairunisa, Prisca, Dessi, Risna, Anita Wahyu, Anita R, mas Candra, Ferri, Ade, Hiksa, Galang, Angga, Hamam, Tito, dan keluarga Ikemas UNDIP lainnya atas segala semangat yang diberikan.
11. Kos Kembar Empat tercinta, Dessi, Prisca, Fanny, Maulida, Nia, Alfa, Atika, Helen, Wettig, Cerra, mb Debby, mb Wike, mb Mey, Menik, Rina, dan Risna atas do'a, motivasi, dan kebersamaan ini.
12. Keluarga ketiga di Semarang, temen-temen KKN Tim II Undip Desa Kriyan, Kalinyamatan, Jepara. Wiga, Elsa, Dwi, Dias, Habib, Steven, Mas Arip, dan Mas Bayu atas do'a, kebersamaan, keceriaan, dan semangat yang diberikan.
13. Sahabatku geng "UNO", Isti, Faridha, Wenny, Kharisma, Afina, Nonie, Iwana, dan Alisya atas do'a, motivasi, dan kebersamaan ini.

14. Sahabat-sahabat tercinta, Intan bias, Isti, Anisa dyah, Netti, Aryani intan, Fiana, Zeliria, atas segala keceriaan, kebersamaan, do'a, dan semangat yang diberikan. *See you on top girls.*
15. Teman-teman yang selalu mengajak refreshing untuk melihat indahnya Indonesia, Cichi, Aryaniintan, Afina, Fiana, Bayu wisnu, Huda, Nizar, Sulaiman, Aris, Aziz, Pepin, Arga atas do'a, kebersamaan, keceriaan, kekonyolan, dan semangat yang diberikan. *See you on top guys.*
16. Teman-teman Akuntansi angkatan 2011 dan teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi, Rista, Titis, Destriana, Pratiwi, Dwi Anita, Prinindia, Rusti, Novita, Nonie, Iwana, Rezky, dan Pepin.
17. Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang selama ini menjadi tempat bagi penulis dalam mengembangkan *softskill* dan berorganisasi.
18. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Januari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	13
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	13

2.1.1 Teori Keagenan .....	13
2.1.2 Teori Legitimasi .....	15
2.1.3 Teori Ketergantungan Sumber Daya.....	16
2.1.4 <i>Corporate Governance</i> .....	17
2.1.4.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	17
2.1.4.2 <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	18
2.1.4.3 Asas <i>Corporate Governance</i> .....	19
2.1.5 <i>Intellectual Capital</i> .....	21
2.1.5.1 Pengertian <i>Intellectual Capital</i> .....	21
2.1.5.2 Komponen <i>Intellectual Capital</i> .....	21
2.1.5.3 Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .....	23
2.1.6 Penelitian Terdahulu .....	23
2.2 Kerangka Pemikiran .....	28
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	31
2.3.1 Atribut <i>Corporate Governance</i> .....	31
2.3.1.1 Ukuran Dewan Direksi.....	31
2.3.1.2 Komisaris Independen .....	32
2.3.1.3 Hubungan Keluarga di Dewan .....	34
2.3.1.4 Rapat Dewan Direksi .....	35
2.3.2 Pola Struktur Kepemilikan .....	36
2.3.2.1 Kepemilikan Manajerial .....	36
2.3.2.2 Kepemilikan Pemerintah .....	37
2.3.2.3 Kepemilikan Institusional .....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	40
3.1.1 Variabel Dependen.....	40
3.1.2 Variabel Independen .....	41
3.1.3 Variabel Kontrol.....	43
3.2 Populasi dan Sampel .....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	46
3.5 Metode Analisis.....	46
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	46
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	46
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	47
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas .....	48
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	48
3.5.2.4 Uji Autokorelasi .....	49
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
3.5.4 Uji Hipotesis.....	51
3.5.4.1 Uji Statistik F .....	51
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	51
3.5.4.3 Uji Statistik t.....	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2 Analisa Data .....	54

4.2.1	Statistik Deskriptif.....	55
4.2.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4.2.3	Uji Asumsi Klasik .....	60
4.2.3.1	Uji Normalitas .....	61
4.2.3.2	Uji Multikolonieritas .....	65
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	66
4.2.3.4	Uji Autokorelasi .....	67
4.2.4	Hasil Pengujian Hipotesis .....	68
4.2.4.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	69
4.2.4.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	70
4.2.4.3	Model dan Uji t .....	71
4.3	Interpretasi Hasil .....	84
4.3.1	Hipotesis 1 .....	84
4.3.2	Hipotesis 2.....	85
4.3.3	Hipotesis 3.....	87
4.3.4	Hipotesis 4.....	88
4.3.5	Hipotesis 5.....	89
4.3.6	Hipotesis 6.....	91
4.3.7	Hipotesis 7 .....	91
4.3.8	Variabel Kontrol.....	92
BAB V PENUTUP.....		96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Keterbatasan .....	99

5.3 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	54
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik.....	55
Tabel 4.3 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.5 Hasil <i>Run Test</i> .....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji F .....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji t Dependen Variabel EICD .....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji t Dependen Variabel QICD .....	78
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	84

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Two Tier System</i> di Indonesia.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Histogram Normalitas Model 1 Regresi EICD .....	61
Gambar 4.2 Histogram Normalitas Model 2 Regresi QICD.....	62
Gambar 4.3 Normal <i>Probability</i> Plot Model 1 Regresi EICD.....	62
Gambar 4.4 Normal <i>Probability</i> Plot Model 2 Regresi QICD .....	63
Gambar 4.5. Grafik <i>Scatterplot</i> EICD.....	66
Gambar 4.6 Grafik <i>Scatterplot</i> QICD .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel .....	104
Lampiran B Daftar Indeks Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .....	106
Lampiran C Tabulasi Data .....	108
Lampiran D Hasil Output SPSS.....	117

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan dibahas beberapa sub bagian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Di bagian latar belakang masalah dijelaskan beberapa alasan mengapa penelitian mengenai atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan di Indonesia perlu dilakukan. Sedangkan di bagian rumusan masalah dijelaskan fokus utama penelitian yaitu tentang atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital*.

Bagian selanjutnya membahas tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan dari penelitian. Di bagian tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan tujuan dan manfaat yang terdapat dalam penelitian ini. Bagian terakhir membahas sistematika penulisan. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era ekonomi berdasarkan pengetahuan, ketidakpuasan atas praktik pelaporan keuangan tradisional termasuk ketidakmampuan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemangku kepentingan perusahaan telah meningkat. Ketidakpuasan ini menyebabkan permintaan jenis informasi yang berbeda. Pelaporan keuangan tradisional tidak secara khusus mempertimbangkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang menggambarkan persentase

signifikan dari nilai total perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan untuk melengkapi pelaporan keuangan tradisional dengan informasi non-keuangan termasuk informasi *intellectual capital* (Abeysekera dan Guthrie, 2005).

Sesuai dengan penjelasan di bagian atas yang menyatakan bahwa laporan keuangan tradisional telah ditambah dengan informasi *intellectual capital*, banyak penelitian empiris dilakukan untuk menyelidiki praktik pengungkapan *intellectual capital* (Goh dan Lim, 2004; Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Abeysekera, 2010). Beberapa penelitian melaporkan berbagai tingkat pengungkapan *intellectual capital* selama bertahun-tahun dengan menunjukkan peningkatan trend pengungkapan *intellectual capital*. Menurut Taylor dan Associates (dalam Nugroho, 2011) menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* termasuk dalam sepuluh peringkat informasi teratas yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Goh dan Lim (2004) menyatakan bahwa informasi *intellectual capital* adalah salah satu informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan perusahaan, khususnya oleh investor, karena informasi mengenai *intellectual capital* menyebabkan investor dapat menilai kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Informasi *intellectual capital* juga dirasakan berguna oleh penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam konteks negara berkembang (Ousama *et al.*, 2011).

Perkembangan pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia masih sedikit. Hal ini disebabkan karena *intellectual capital* merupakan konsep pengetahuan yang masih baru dan terdapat kesulitan dalam melakukan

pengukuran *intellectual capital* yang cenderung bersifat kualitatif. Oleh karena itu, terdapat kesulitan dalam pengimplementasian *intellectual capital* di perusahaan. *Intellectual capital* muncul sejak diterbitkannya PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud, namun tidak disebutkan mengenai *intellectual capital* secara eksplisit. Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010) aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan minim wujud fisik. Aset tidak berwujud ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu aset tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan tertentu, seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, *franchise* terbatas, dan aset tidak berwujud yang tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, seperti merk dagang, proses dan formula rahasia, dan *goodwill*.

Pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* dalam laporan tahunannya. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua perusahaan-perusahaan publik yang menerbitkan laporan tahunan maupun laporan keuangan mengungkapkan *intellectual capital* yang perusahaan miliki sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi antara penyusun dan pengguna laporan.

Faktor-faktor yang memengaruhi praktik pengungkapan *intellectual capital* hanya sedikit yang diketahui karena sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat deskriptif (Goh dan Lim, 2004; Abeysekera, 2008). Dalam penelitian yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *intellectual capital*, karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan dan industri merupakan hal

yang utama untuk diteliti. Dengan pengecualian dari beberapa penelitian (Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Li *et al.*, 2008; Hidalgo *et al.*, 2011) hubungan antara *corporate governance*, pola struktur kepemilikan, dan pengungkapan *intellectual capital* jarang diteliti dalam literature pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian-penelitian yang dilakukan di Eropa ini membentuk hubungan yang kuat antara *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Seperti beberapa penelitian yang terutama dilakukan di negara-negara maju, bukti empiris mengenai pengaruh atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital* disebut dalam konteks lain, misalnya Asia (Cerbioni dan Parbonetti, 2007). Oleh karena itu, motivasi utama peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah adanya kelangkaan penelitian yang menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* dengan mengikuti kode revisi *corporate governance* di Indonesia, karena restrukturisasi *corporate governance* diyakini menghasilkan pelaporan *intellectual capital* yang lebih baik (Burgman dan Roos, 2007). Penelitian ini juga berusaha memperluas penelitian sebelumnya secara metodologis dengan menggunakan analisis data panel dan secara kontekstual dengan mencari bukti dari negara berkembang.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) diperkenalkan pada tahun 1999 setelah krisis keuangan Asia 1997/1998. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*

(KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (*public governance*). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Penerapan *corporate governance* membentuk perusahaan untuk lebih transparan, bertanggung jawab, independen, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Peneliti berpendapat bahwa apabila insiatif dan perubahan ini ditujukan untuk menghasilkan praktik *corporate governance* yang lebih baik, idealnya atribut *corporate governance* harus mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini karena pengungkapan dianggap sebagai bagian penting dari *corporate governance* yang baik (Patel *et al.*, 2002).

Penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007) menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel yang diuji adalah komisaris independen, komposisi dewan, dualitas CEO, struktur dewan dan pengungkapan sukarela *intellectual capital*. Lima puluh empat perusahaan bioteknologi yang terdaftar di negara-negara Eropa tahun 2002-2004 dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela *intellectual capital* sedangkan komposisi dewan, dualitas CEO dan struktur dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela *intellectual capital*.

Penelitian Li *et al.* (2008) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel yang digunakan adalah komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi rapat

komite audit, dan peran dualitas CEO. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua atribut *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*, kecuali peran dualitas CEO.

Penelitian Hidalgo *et al.* (2011) menyelidiki pengaruh atribut *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital* dengan menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Meksiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan direksi yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian Nugroho (2011) menguji pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian menggunakan proporsi komisaris independen, konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel 36 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara semua faktor *corporate governance* kecuali proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan auditor eksternal terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian Arifah (2012) juga menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi komisaris,

keindependensian komisaris independen, kesibukan komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel 45 perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan IC *intensive* pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit merupakan satu-satunya mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) yang menggunakan sampel perusahaan mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi di Malaysia. Penelitian ini menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* dengan menggunakan sampel perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen dan dalam hal sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, rapat dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, rapat dewan direksi, posisi CEO, kepemilikan direksi, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Penerapan *corporate governance* di Malaysia dan Indonesia mempunyai sistem yang berbeda sehingga pada penelitian ini tidak memasukkan variabel posisi CEO. Selain itu, penelitian ini menggunakan seluruh sampel penelitian pada perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi di Indonesia pada tahun 2011-2013.

Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel penelitian pada perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi di Malaysia pada tahun 2008-2010.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Ketidakpuasan atas praktik pelaporan keuangan tradisional mendorong perusahaan untuk menyediakan berbagai informasi tambahan yang berguna bagi para *stakeholder* perusahaan. Informasi tambahan ini bersifat sebagai informasi non-keuangan, termasuk informasi pengungkapan *intellectual capital* (Abeysekera dan Guthrie, 2005). Informasi atas tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu atribut *corporate governance* dan pola struktur kepemilikan.

Penelitian mengenai pengungkapan *intellectual capital* semakin berkembang secara internasional. Penelitian ini terutama dilakukan di negara-negara maju secara ekonomi, karena telah terdapat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan pada negara tersebut (Abeysekera, 2007). Hanya sedikit penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang. Selain itu, terdapat kekurangan definisi *intellectual capital* yang diterima secara umum. Seringkali literatur menawarkan definisi *intellectual capital* yang berbeda. Namun demikian, secara luas *intellectual capital* didefinisikan sebagai selisih antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan (Ordonez de Pablos, dalam Haji A. A dan Mohd Ghazali, 2013). *Intellectual capital* merupakan konsep pengetahuan yang masih baru sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan pengukuran *intellectual capital*

yang cenderung bersifat kualitatif. Oleh karena itu, masih terdapat kesulitan dalam pengimplementasian *intellectual capital* di perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya kelangkaan penelitian yang menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada negara berkembang. Selain itu, beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil penelitian kurang menunjukkan hasil yang konsisten dan masih menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
3. Bagaimana pengaruh hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
4. Bagaimana pengaruh rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
2. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
3. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
4. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
5. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
6. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
7. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Temuan penelitian ini menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* di negara berkembang, seperti Indonesia.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literature untuk bahan referensi yang dapat menambah pemahaman mengenai atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital* dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab telaah pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran populasi dan sampel yang digunakan dalam studi empiris, pengidentifikasian variabel-variabel penelitian serta penjelasan mengenai cara pengukuran variabel-variabel tersebut. Selain itu juga dikemukakan teknik pemilihan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab hasil dan pembahasan merupakan isi pokok dari seluruh penelitian ini, bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data, dan analisis atas hasil pengolahan tersebut.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi bagi penelitian mendatang dan pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab telaah pustaka dibahas mengenai: (i) teori keagenan, teori legitimasi, dan teori ketergantungan sumber daya yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini dan konsep-konsep mengenai atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital* serta penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (ii) kerangka penelitian, dan (iii) pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu.

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berdasar pada teori keagenan, teori legitimasi, dan teori ketergantungan sumber daya. Teori keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori legitimasi menunjukkan adanya kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat untuk meningkatkan legitimasi perusahaan. Teori ketergantungan sumber daya memandang bahwa adanya dewan yang lebih besar terkait dengan kinerja perusahaan yang lebih baik.

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan berkaitan dengan hubungan prinsipal dengan agen dalam pemisahan kepemilikan dan manajemen, pemisahan risiko, pengambilan keputusan dan fungsi manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan prinsipal dengan agen sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih prinsipal melibatkan agen untuk melakukan

beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pembuatan keputusan. Dalam kontrak tersebut, agen terikat untuk memberikan jasa kepada prinsipal.

Dalam pendelegasian wewenang prinsipal kepada agen, manajemen sebagai agen diberi hak untuk menentukan keputusan bisnis bagi kepentingan prinsipal. Kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu sejalan sehingga dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan atau konflik antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan atau lembaga tertentu memiliki keunggulan informasi daripada pihak lain. Dalam hal ini, manajer (agen) sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal sebagai pihak eksternal.

Hendriksen dan Breda (2001) menyatakan bahwa terdapat 2 permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika terdapat asimetri informasi sehingga manajer (agen) dapat mengeksploitasi keuntungan dengan pengelolaan informasi yang diberikan kepada prinsipal. Informasi yang tidak lengkap dari manajer (agen) tersebut dapat merugikan prinsipal karena tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak sehingga prinsipal tidak dapat mengamati semua aksi manajer (agen). Asimetri informasi juga menyebabkan terjadinya masalah kekacauan moral (*moral hazard*). Moral hazard terjadi ketika manajer (agen)

melakukan tindakan tanpa sepengetahuan prinsipal untuk keuntungan pribadinya dan dapat menurunkan kesejahteraan prinsipal.

Pelaksanaan *corporate governance* diperlukan dalam suatu perusahaan karena manajer (agen) cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi dan melalaikan kepentingan pemegang saham. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan dan dapat mengubah perilaku manajer (agen) sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya *moral hazard* oleh manajemen.

Singh dan Zahn (dalam Haji A. A dan Mohd Ghazali, 2013) menyatakan bahwa teori keagenan juga menunjukkan bahwa penggunaan pelaporan *intellectual capital* secara sukarela dapat mengurangi masalah asimetri informasi. Selain itu, informasi *intellectual capital* juga dapat meredakan konflik prinsipal dengan agen karena informasi *intellectual capital* akan meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.1.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori legitimasi berkaitan dengan hubungan antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan harus terus berusaha untuk menjamin operasi atau aktivitas perusahaan berada dalam batas dan norma masing-masing masyarakat sehingga dianggap "sah" oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat (Deegan dan Samkin, dalam An *et al.*, 2011). Selain itu, status legitimasi juga dianggap penting bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan.

Teori legitimasi menunjukkan bahwa terdapat “kontrak sosial” antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial digunakan untuk mewakili sejumlah besar harapan-harapan masyarakat. Berdasarkan konsep kontrak sosial, perusahaan harus melakukan operasi atau aktivitas perusahaan dalam harapan dan norma-norma masyarakat luas. Apabila perusahaan sesuai dengan harapan dan norma-norma masyarakat, masyarakat akan mengizinkan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus ikut serta terhadap lingkungan di mana perusahaan beroperasi (Deegan dan Samkin, dalam An *et al.*, 2011).

Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menyatakan bahwa teori legitimasi dikaitkan erat dengan pelaporan *intellectual capital*. Perusahaan melaporkan informasi *intellectual capital* untuk melegitimasi aktivitas perusahaan. Teori legitimasi menyiratkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* akan memungkinkan perusahaan untuk membangun citra jangka panjang yang menguntungkan masyarakat luas.

### **2.1.3 Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*)**

Teori ketergantungan sumber daya memandang bahwa dewan direksi sebagai mekanisme yang berhasil dalam mengurangi ketidakpastian eksternal (Pfeffer dan Salancik, dalam Abeysekera, 2010). Dewan direksi memiliki sumber daya yang beragam, seperti informasi, ketrampilan, dan legitimasi. Oleh karena itu, ukuran dewan direksi yang lebih besar seharusnya lebih efektif daripada ukuran dewan direksi yang lebih sedikit, karena ukuran dewan

direksi yang lebih besar dapat membuat keputusan kolektif yang lebih baik.

Teori ketergantungan sumber daya (Pfeffer, 1972, 1973) menekankan bahwa dewan yang lebih besar akan meningkatkan keahlian dan menawarkan berbagai perspektif besar dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan direksi yang lebih besar juga menawarkan peningkatan kapasitas pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan. Demikian pula, lebih banyak dewan direksi dapat mengkompensasikan kekurangan individu dalam keterampilan pengambilan keputusan kolektif (Abeysekera, 2010).

## **2.1.4 Corporate Governance**

### **2.1.4.1 Pengertian Corporate Governance**

*Corporate governance* adalah suatu sistem atau cara di mana perusahaan dikendalikan untuk arah perusahaan yang bertanggung jawab kepada *stakeholders* (Dahya *et al.*, dalam Haji, A. A dan Mohd Ghazali, 2013). Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* diartikan sebagai:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

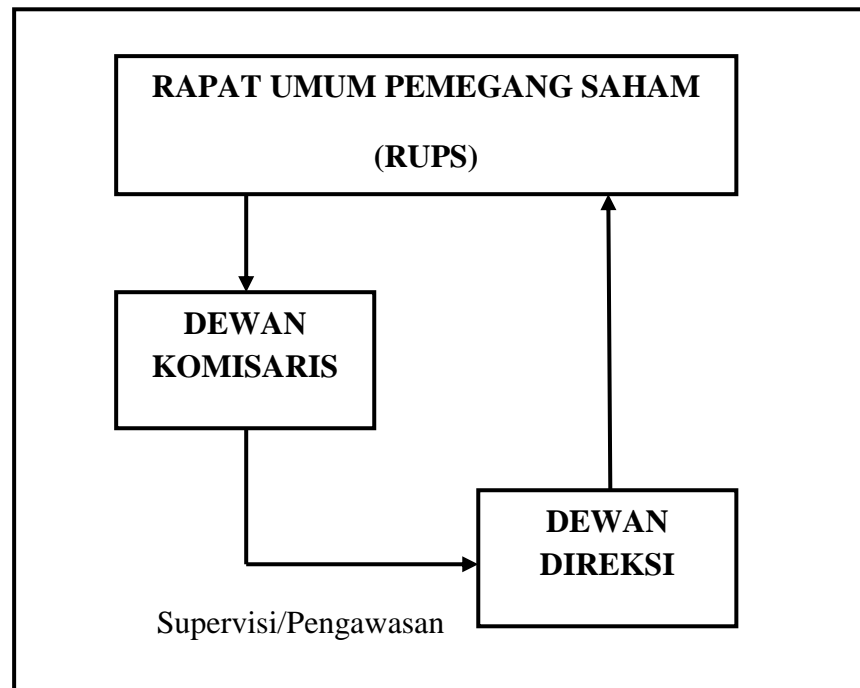
Selain itu, FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Terdapat praktik *corporate governance* yang berbeda yaitu berasal sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2001). Sistem tersebut adalah *one tier system* dari Anglo Saxon dan *two tier system* dari Kontinental Eropa. Negara-negara yang menggunakan *one tier system* adalah Amerika Serikat, Inggris, Canada, dan Australia. Sedangkan negara-negara yang menggunakan *two tier system* adalah Jerman, Belanda, Denmark, dan Jepang. Indonesia menggunakan *two tier system* dalam struktur dewan perusahaan karena pengaruh sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda.

#### **2.1.4.2 Corporate Governance di Indonesia**

Indonesia menganut *two tier system* untuk struktur dewan dalam perusahaan (FCGI). Pada *two tier system* ini, terdapat dua organ perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Menurut Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Hubungan antara dewan direksi dan dewan komisaris dalam *two tier system* di Indonesia dapat dijelaskan pada gambar 2.1 dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam *Two Tier System* yang diadopsi di Indonesia**



Sumber: FCGI, 2001

#### 2.1.4.3 Asas *Corporate Governance* (GCG)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), ada 5 asas *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

## 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## **2.1.5 *Intellectual Capital***

### **2.1.5.1 Pengertian *Intellectual Capital***

Terdapat berbagai definisi *intellectual capital* yang berbeda dari berbagai literatur yang ada. Definisi *intellectual capital* menurut *The Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) (dalam Li, *et al.*, 2008) adalah:

... kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan *skill*, hubungan-hubungan yang baik, dan kapasitas teknologi, yang mana ketika diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif organisasi.

Edvinsson dan Malone (dalam Shiddiq, 2013) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai pengetahuan yang tidak terlihat secara fisik yang dapat dikonversi menjadi nilai bagi perusahaan meskipun tidak terlihat dalam laporan keuangan. Selain itu, *intellectual capital* juga didefinisikan secara luas sebagai perbedaan atau selisih antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan (Ordenez de Pablos, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Oleh karena itu, *intellectual capital* dapat didefinisikan sebagai semua proses berdasarkan aset tidak berwujud yang mencakup sumber daya perusahaan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.1.5.2 Komponen *Intellectual Capital***

*Intellectual capital* terdiri dari beberapa komponen-komponen yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing perusahaan. Ada banyak pendapat mengenai komponen-komponen *intellectual capital* sehingga muncul kekhawatiran mengenai perbedaan kategorisasi pengungkapan *intellectual capital*. Tampak bahwa klasifikasi yang dikembangkan oleh Sveiby (dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali,

2013) mendapat penerimaan universal seperti yang telah dimanfaatkan oleh sejumlah penelitian sebelumnya di negara maju dan negara berkembang.

Saat ini klasifikasi Sveiby (1997) menjadi yang paling umum digunakan dalam literatur pengungkapan *intellectual capital*. Sveiby (1997) membagi *intellectual capital* ke dalam tiga komponen, yaitu:

1. Struktur internal (*internal structure*), meliputi struktur organisasi, sistem-sistem manual, dan perangkat lunak.
2. Struktur eksternal (*external structure*), meliputi hubungan dengan pelanggan dan pemasok serta merk dan nama perusahaan.
3. Kompetensi karyawan (*employee competence*), meliputi pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan dan staf perusahaan.

Klasifikasi Sveiby (1997) kemudian dimodifikasi oleh Guthrie dan Petty (2000) menjadi modal internal (*internal capital*), modal eksternal (*external capital*), dan modal manusia (*human capital*). Menurut Guthrie *et al.* (2004):

Modal internal (*internal capital*) meliputi sistem, kebijakan, budaya, dan kemampuan organisasi lainnya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Modal eksternal (*external capital*) mencakup hubungan eksternal dengan orang-orang di luar organisasi, dan modal manusia (*human capital*) mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan keahlian karyawan.

Modal internal (*internal capital*), modal eksternal (*external capital*), dan modal manusia (*human capital*) merupakan komponen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberi perhatian pada ketiga komponen *intellectual capital* tersebut agar dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

### **2.1.5.3 Pengungkapan *Intellectual Capital***

Pengungkapan *intellectual capital* adalah suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (Abeysekera, 2007). Pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan tidak dimasukkan dalam neraca walaupun *intellectual capital* diidentifikasi sebagai aset tidak berwujud. Hal ini disebabkan pengungkapan *intellectual capital* sulit untuk diukur dan dikuantifikasikan. PSAK No. 19 (revisi 2010) belum mengatur mengenai identifikasi dan pengukuran *intellectual capital*, sehingga pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Pengungkapan *intellectual capital* merupakan informasi tambahan yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi *intellectual capital*, perusahaan dapat mengatasi masalah yang ada dalam hubungan keagenan, seperti asimetri informasi. Biaya keagenan akan timbul dari perilaku oportunistik manajer, sehingga perusahaan termotivasi untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* secara sukarela untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

### **2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu mengenai atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital* yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007) menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel yang diuji adalah komisaris independen, komposisi

dewan, dualitas CEO, struktur dewan dan pengungkapan sukarela *intellectual capital*. Lima puluh empat perusahaan bioteknologi yang terdaftar di negara-negara Eropa tahun 2002-2004 dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela *intellectual capital* sedangkan komposisi dewan, dualitas CEO dan struktur dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela *intellectual capital*.

Penelitian Li *et al.* (2008) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel yang digunakan adalah komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan peran dualitas CEO. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua atribut *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*, kecuali peran dualitas CEO.

Penelitian Hidalgo *et al.* (2011) menyelidiki pengaruh atribut *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital* dengan menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Meksiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan direksi yang memiliki pengaruh signifikan positif dengan tingkat pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dengan tingkat pengungkapan *intellectual capital*.

Nugroho (2011) menguji pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian menggunakan proporsi

komisaris independen, konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel 36 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara semua faktor *corporate governance* kecuali proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan auditor eksternal terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Arifah (2012) juga menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi komisaris, keindependensian komisaris independen, kesibukan komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel 45 perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan IC *intensive* pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit merupakan satu-satunya mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian ini menggunakan atribut *corporate governance* (ukuran perusahaan, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, pertemuan dewan, dan posisi ketua) dan pola struktur kepemilikan (kepemilikan direksi, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusi) sebagai variabel independen dan pengungkapan *intellectual capital* sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua atribut *corporate*

*governance* yaitu ukuran perusahaan, komisaris independen, rapat dewan, dan posisi ketua (kecuali hubungan keluarga di dewan) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam arah yang diharapkan terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan direksi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Dan kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan dalam menentukan tingkat pengungkapan *intellectual capital*.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti dan Tahun</b>	<b>Metodologi</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Cerbioni dan Parbonetti (2007)	Analisis regresi berganda	Variabel dependen: <i>Voluntary ICD</i>  Variabel independen: Komisaris independen, komposisi dewan, dualitas CEO, struktur dewan.	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>voluntary ICD</i> . Komposisi dewan, dualitas CEO, dan stuktur dewan berpengaruh negatif terhadap <i>voluntary ICD</i> .
Li <i>et al.</i> (2008)	Analisis regresi berganda	Variabel dependen: ICD Variabel independen: Komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan peran dualitas CEO.	Semua atribut <i>corporate governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ICD, kecuali peran dualitas CEO.
Hidalgo <i>et al.</i> (2011)	Analisis regresi berganda	Variabel dependen: ICD  Variabel independen: Ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit independen, dualitas CEO, kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan,	Ukuran dewan direksi direksi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat ICD. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat ICD.

		dan kepemilikan institusional.	
Bangkit Nugroho (2011)	Analisis regresi berganda	Variabel dependen: ICD Variabel independen: Proporsi komisaris independen, konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusi.	Semua faktor <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap ICD, kecuali proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan auditor eksternal.
Dista Amalia Arifah (2012)	Analisis regresi berganda	Variabel dependen: ICD Variabel independen: Ukuran dewan direksi komisaris, keindependensian komisaris independen, kesibukan komisaris independen, dan komite audit.	Hanya komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap ICD.
Abdifatah Ahmed Haji dan Nazli A. Mohd Ghazali (2013)	Analisis regresi berganda	Variabel dependen: ICD  Variabel independen: Atribut <i>corporate governance</i> (ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, rapat dewan direksi, dan posisi CEO) dan pola struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional)	Semua atribut <i>corporate governance</i> yaitu ukuran dewan direksi, komisaris independen, rapat dewan direksi, dan posisi CEO kecuali hubungan keluarga di dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat dan kualitas ICD. Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap ICD. Kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat ICD.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013). Namun demikian, penelitian ini berbeda dalam hal sampel penelitian dan penggunaan variabel independen.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Hubungan logis antar variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan divisualisasikan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Pembahasan alasan dan penyajian gambar sebagai berikut.

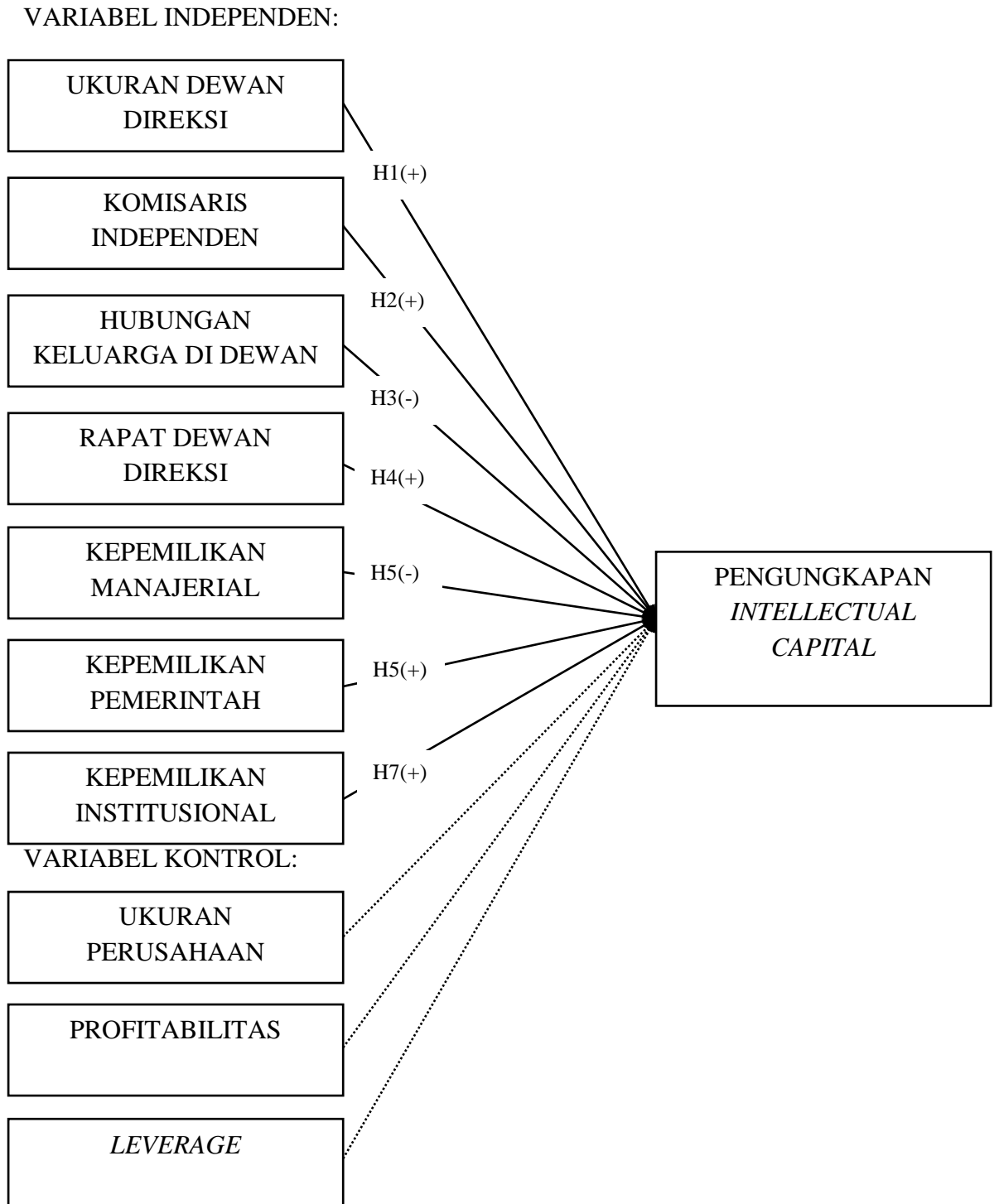
Pelaporan keuangan tradisional tidak secara khusus mempertimbangkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang menggambarkan persentase signifikan dari nilai total perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan berusaha memenuhi tuntutan para *stakeholder* untuk melengkapi pelaporan keuangan tradisional dengan informasi non-keuangan, termasuk informasi *intellectual capital*. Pengungkapan *intellectual capital* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu atribut *corporate governance* dan pola struktur kepemilikan. Atribut *corporate governance* dan pola struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan oleh variabel-variabel yang menjadi karakteristiknya. Variabel kontrol digunakan dalam penelitian ini untuk mengontrol ukuran dan keadaan keuangan perusahaan.

Penelitian ini mengukur variabel atribut *corporate governance* dengan memproksikannya menjadi 4 variabel, yaitu ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, dan rapat dewan direksi. Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa adanya dewan yang lebih besar berhubungan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Komisaris independen

memiliki peran utama untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham terlindung dengan baik, sehingga akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi tambahan. Adanya hubungan keluarga di dewan direksi bisa memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan, karena apabila sudah terkonsentrasi kepemilikan akan terdapat sedikit konflik kepentingan, sehingga terdapat kecenderungan untuk tidak mengungkapkan informasi tambahan. Adanya rapat dewan direksi merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat antara agen dan prinsipal.

Variabel pola struktur kepemilikan diproksikan menjadi 3 variabel, yaitu kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), kepemilikan pemerintah (*government ownership*), dan kepemilikan institusional (*institutional ownership*). Kepemilikan manajerial diukur dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh manajer, direktur, dan komisaris perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan menghasilkan konflik kepentingan yang lebih rendah karena para manajer memiliki lebih banyak insentif untuk memaksimalkan kinerja, sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit. Kepemilikan pemerintah akan lebih bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi perusahaan karena perusahaan pemerintah menguasai hajat hidup masyarakat luas. Kepemilikan institusional memiliki hubungan kuat dengan pemerintah untuk menunjukkan proses legitimasi oleh investor institusi. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Atribut *Corporate Governance***

Penelitian ini menguji 4 atribut *corporate governance* yaitu ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, dan rapat dewan direksi dalam upaya untuk menyelidiki apakah perubahan peraturan *corporate governance* menghasilkan praktik pengungkapan *intellectual capital* yang lebih baik. Sebuah sistem *corporate governance* diciptakan oleh atribut yang saling terkait untuk memastikan tata kelola yang baik (Cerbioni dan Parbonetti, 2007).

#### **2.3.1.1 Ukuran Dewan Direksi (*Board Size*)**

Sejumlah penelitian dilakukan untuk menyelidiki dampak dari ukuran dewan direksi pada berbagai organisasi seperti manajemen strategis, kinerja perusahaan dan pengungkapan *intellectual capital* (Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Hidalgo *et al*, 2011). Telah dikemukakan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat mengurangi masalah koordinasi dan meningkatkan kemampuan dewan untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan.

Teori ketergantungan sumber daya (Pfeffer, 1972, 1973) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar akan meningkatkan keahlian dan menawarkan berbagai perspektif besar untuk pengambilan keputusan. Ukuran dewan direksi yang lebih besar juga menawarkan peningkatan kapasitas pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan. Demikian pula, lebih banyak dewan direksi dalam struktur dewan perusahaan bisa mengkompensasi

kekurangan individu dalam keterampilan melalui pengambilan keputusan kolektif dewan.

Hasil sejumlah penelitian empiris didokumentasikan sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya karena peneliti menemukan ukuran dewan direksi yang lebih besar terkait dengan kinerja organisasi yang lebih baik (Dalton dan Dalton, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Cerbioni dan Parbonetti (2007) mendokumentasikan pengaruh negatif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual* secara keseluruhan. Selain itu, Abeysekera (2010) dan Hidalgo *et al.* (2011) keduanya menemukan pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap internal capital taktis dan strategis pengungkapan *intellectual capital*. Abdul Rashid *et al.* (2012) juga mengamati hubungan positif yang signifikan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada prospectus perusahaan IPO di Malaysia. Konsisten dengan teori ketergantungan sumber daya, peneliti berharap ada pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut ini hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

**H1. Ada pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

### **2.3.1.2 Komisaris Independen (*Independent Non-Executive Directors*)**

Dewan komisaris secara kolektif dilihat sebagai unit internal yang mempunyai tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemilik (Li *et al.*, 2008). Komisaris independen memiliki peran utama untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham terlindung dengan baik (Fama, 1980). Dari

perspektif pengungkapan, komisaris independen diharapkan dapat menekan perusahaan untuk terlibat dalam pengungkapan tambahan (Haniffa dan Cooke, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Li *et al.* (2008) berpendapat bahwa keahlian yang lebih luas dan pengalaman komisaris independen akan mendorong manajemen untuk mengambil posisi pengungkapan tambahan, kepatuhan kritis dengan norma-norma yang ditentukan ke posisi yang lebih proaktif untuk mencerminkan relevansi nilai *intellectual capital* bagi para pemangku kepentingan.

Literatur dalam sisi lain menawarkan kritik atas peran komisaris independen dalam meningkatkan transparansi dan kinerja perusahaan. Kekhawatiran atas komisaris independen sering menyebut apakah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan itu benar-benar independen (Mohd Ghazali dan Weetman, 2006). Kekhawatiran ini juga telah diajukan oleh penelitian-penelitian di negara lain (Li *et al.*, 2008).

Kekurangan independensi yang sesungguhnya berasal dari komisaris independen karena penelitian empiris tentang hubungan antara komisaris independen dan pengungkapan *intellectual capital* tidak meyakinkan. Cerbioni dan Parbonetti (2007) dan Li *et al.* (2008) keduanya menemukan pengaruh positif signifikan komisaris independen dan pengungkapan *intellectual capital* di Eropa, sedangkan Abdul Rashid *et al.* (2012) mendokumentasikan pengaruh negatif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan IPO di Malaysia. Selain itu, Hidalgo *et al.* (2011) dan Taliyang dan Jusop (2011) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan komisaris independen

terhadap pengungkapan *intellectual capital* di Meksiko dan Malaysia. Kode *corporate governance* yang telah direvisi diharapkan dapat digunakan oleh komisaris independen dalam melaksanakan peran mereka secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengharapkan adanya pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital* dengan mengikuti kode revisi *corporate governance* di Indonesia:

**H2. Ada pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

### **2.3.1.3 Hubungan keluarga di dewan (*Family Members on the Board*)**

Kehadiran anggota keluarga pada struktur dewan perusahaan merupakan fitur tradisional dalam lingkungan bisnis di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Adanya kehadiran anggota keluarga dalam dewan memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan (Haniffa dan Cooke, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Perusahaan yang memiliki persentase hubungan keluarga di dewan yang lebih tinggi dapat dikatakan telah terkonsentrasi kepemilikan karena mempunyai tingkat konflik kepentingan yang lebih rendah. Hal ini akan menyebabkan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi tambahan mungkin berkurang (Mohd Ghazali dan Weetman, 2006).

Terdapat sejumlah penelitian empiris yang meneliti hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan sukarela (Mohd Ghazali dan Weetman, 2006). Ada hasil penelitian konsisten karena semua melaporkan pengaruh negatif signifikan hubungan keluarga di dewan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan persentase yang lebih tinggi

atas hubungan keluarga di dewan akan kurang memberikan informasi sukarela. Namun, tidak ada penelitian yang meneliti pengaruh hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dalam menyelidiki hubungan antara dua variabel. Berikut hipotesis dikembangkan dalam bentuk alternatif:

**H3. Ada pengaruh negatif hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

#### **2.3.1.4 Rapat Dewan Direksi (*Board Meeting*)**

Teori keagenan menyiratkan bahwa meskipun tujuan utama dari manajer (agen) adalah memaksimalkan kepentingan masing-masing, para manajer juga akan bertindak dengan berbagai cara untuk menyenangkan para pemegang saham (prinsipal). Salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi sering mengadakan rapat dewan direksi dalam membahas masalah perusahaan. Frekuensi rapat dewan direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota dewan berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan (Khanchei, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Hal ini akan menyediakan pintu untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan mengatasi masalah yang terjadi di dalam perusahaan.

Penelitian empiris sebelumnya tidak mempertimbangkan pengaruh rapat dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela. Namun, beberapa penelitian menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al*, 2008; Taliyang dan Jusop, 2011). Kedua penelitian ini melaporkan pengaruh positif yang signifikan frekuensi rapat dewan direksi dan

tingkat pengungkapan *intellectual capital* di Inggris dan Malaysia. Berdasarkan penjelasan literature di atas, harapan peneliti adalah rapat dewan direksi akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat praktik pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, berikut hipotesis alternatif dikembangkan:

**H4. Ada pengaruh positif rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

### **2.3.2 Pola struktur kepemilikan**

Penelitian ini juga menguji 3 pola struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional.

#### **2.3.2.1 Kepemilikan Manajerial (*Managerial ownership*)**

Pemilik yang mengelola perusahaan adalah fitur umum di lingkungan perusahaan Indonesia. Persentase saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kepemilikan manajerial (Eng dan Mak, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Teori keagenan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan menghasilkan konflik keagenan yang lebih rendah karena dewan direksi ini akan memiliki lebih banyak insentif untuk memaksimalkan kinerja. Oleh karena itu, pemegang saham eksternal mungkin tidak memerlukan informasi tambahan untuk pemantauan perilaku manajer (agen). Adanya pemilik yang mengelola perusahaan cenderung akan memiliki lebih sedikit insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela (Mohd Ghazali, 2007). Hal ini disebabkan karena pemilik bisa mendapatkan informasi melalui saluran informal.

Konsisten dengan alasan di atas, penelitian sebelumnya menemukan pengaruh negatif yang signifikan kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan sukarela (Mohd Ghazali dan Weetman, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk memperluas penelitian dalam tema pengungkapan *intellectual capital* dengan memeriksa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan teori keagenan dan hasil empiris dari penelitian sebelumnya, peneliti berharap ada pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, hipotesis berikut dikembangkan dalam bentuk alternatif:

**H5. Ada pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

### **2.3.2.2 Kepemilikan Pemerintah (*Government ownership*)**

Di Indonesia kepemilikan pemerintah dibuktikan dalam perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan pengendali langsung atas perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat luas sehingga pemerintah merasakan tekanan tambahan untuk mendorong investasi pada *intellectual capital*, seperti pembangunan modal manusia. Harapan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengubah negara menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan di mana pemerintah adalah pemegang saham mayoritas akan memiliki investasi yang lebih tinggi pada *intellectual capital*. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan untuk melegitimasi kegiatan pemerintah.

Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah secara positif berkaitan dengan pengungkapan sukarela (Mohd Ghazali, 2007). Yau *et al.* (2009) membandingkan pengungkapan *intellectual capital* di perusahaan dengan mayoritas kepemilikan saham pemerintah dan sebaliknya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan mayoritas kepemilikan saham pemerintah menyediakan pengungkapan *intellectual capital* lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non kepemilikan pemerintah. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa perusahaan di mana pemerintah adalah pemegang saham mayoritas akan mengungkapkan lebih informasi *intellectual capital*. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H6. Ada pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

### **2.3.2.3 Kepemilikan Institusional (*Institutional ownership*)**

Di pasar modal Indonesia telah terdapat peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham institusional. Pemilik institusional memainkan peran signifikan atas *corporate governance* dan praktik pengungkapan karena cenderung untuk menggunakan hal ini sebagai alat untuk memantau agen (Saleh *et al.*, 2010). Secara khusus, pengungkapan tambahan digunakan sebagai mekanisme untuk memantau perusahaan oleh pemegang saham institusional. Pengungkapan informasi tambahan termasuk investasi pada *intellectual capital* dapat membantu investor institusional dalam pengambilan keputusan atas kinerja manajemen. Beberapa penelitian empiris menemukan pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan. Penelitian Saleh *et al.* (2010) menemukan

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, Hidalgo *et al.* (2011) menemukan pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital* di Meksiko. Peneliti berharap ada pengaruh positif kepemilikan institusi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, hipotesis berikut dikembangkan dalam bentuk alternatif:

**H7. Ada pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasional variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan dan membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Secara umum penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian dalam penelitian ini adalah pengungkapan *intellectual capital* yang dijabarkan lagi menjadi 2 proksi variabel dependen, yaitu tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Tingkat pengungkapan *intellectual capital* dilambangkan dalam EICD dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* dilambangkan dalam QICD.

Teknik analisis konten digunakan untuk memperoleh data mengenai pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian ini menggunakan kategori komponen *intellectual capital* Sveiby (1997) yang dikembangkan oleh Li *et al.* (2008) dengan menggunakan kategori 40 indeks, yaitu 9 indeks untuk *internal*

*capital*, 17 indeks untuk *eksternal capital*, dan 14 indeks untuk *human capital*. Tingkat pengungkapan *intellectual capital* adalah jumlah item dalam indeks yang diungkapkan dan dibagi dengan skor maksimum yang mungkin (yaitu 40). Variabel ini diukur dengan menggunakan pendekatan dikotomis (*dichotomous approach*). Pendekatan dikotomis digunakan untuk memberi skor tingkat pengungkapan *intellectual capital*, yaitu nilai 0 diberikan apabila item pengungkapan *intellectual capital* tidak muncul dalam laporan tahunan dan nilai 1 diberikan apabila item pengungkapan *intellectual capital* diungkapkan.

Kualitas pengungkapan *intellectual capital* adalah jumlah item dalam daftar yang diungkapkan berdasarkan skala 0-3 dan dibagi dengan skor maksimum yang mungkin (yaitu 120). Variabel ini diukur dengan menggunakan pendekatan pembobotan (*weighting approach*). Pendekatan pembobotan ini menggunakan skala empat poin (skala 0-3). Nilai 0 diberikan apabila item pengungkapan *intellectual capital* tidak muncul dalam laporan keuangan, nilai 1 diberikan apabila item tersebut muncul dalam bentuk narasi, nilai 2 diberikan apabila item tersebut diungkapkan dalam istilah numerik, dan nilai 3 sebagai nilai tertinggi diberikan apabila item tersebut diungkapkan dalam satuan moneter (mata uang).

### **3.1.2 Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Ukuran Dewan Direksi

Variabel independen ukuran dewan direksi dinyatakan dengan lambang variabel BSIZE. Variabel BSIZE digunakan untuk menggambarkan jumlah dewan direksi yang terdapat di perusahaan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah total dewan direksi dalam struktur dewan perusahaan.

#### 2. Komisaris Independen

Variabel komisaris independen mencerminkan proporsi keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Variabel ini dinyatakan dengan lambang INDS dan diukur berdasarkan persentase komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan.

#### 3. Hubungan Keluarga di Dewan

Variabel independen hubungan keluarga di dewan mencerminkan proporsi hubungan keluarga di struktur dewan perusahaan. Variabel ini dinyatakan dengan lambang FMB dan diukur berdasarkan persentase hubungan keluarga antara dewan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham kendali di struktur dewan terhadap jumlah total struktur dewan perusahaan.

#### 4. Rapat Dewan Direksi

Variabel independen rapat dewan direksi dinyatakan dengan lambang BMEETING. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan frekuensi diadakannya pertemuan antara manajer (agen) dan prinsipal (*stakeholder*). Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah total diadakannya rapat dewan direksi direksi.

#### 5. Kepemilikan Manajerial

Variabel independen kepemilikan manajerial mencerminkan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris. Variabel ini dinyatakan dengan lambang MANOWN dan diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris dalam perusahaan.

#### 6. Kepemilikan Pemerintah

Variabel independen kepemilikan pemerintah mencerminkan proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah dalam suatu perusahaan. Variabel ini dinyatakan dengan lambang GOVOWN. Variabel ini diukur dengan memberikan nilai 1 apabila kepemilikan saham pemerintah sebesar 5% atau lebih dan nilai 0 pada kepemilikan saham pemerintah kurang dari 5%.

#### 7. Kepemilikan Institusional

Variabel independen kepemilikan institusional mencerminkan proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional. Variabel ini dinyatakan dengan lambang IOWN dan diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan ekuitas 5% atau lebih.

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *intellectual capital*. Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen dan pasti berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

#### 1. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan dinyatakan dengan lambang SIZE. Variabel ini menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai total aset yang disajikan dalam neraca akhir tahun.

#### 2. Profitabilitas

Variabel profitabilitas dinyatakan dengan lambang ROE. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dan diukur dengan rasio laba bersih terhadap total ekuitas perusahaan.

#### 3. *Leverage*

Variabel *leverage* dinyatakan dalam lambang LEV. Variabel ini merupakan ukuran perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio antara total hutang terhadap total aset.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi pada tahun 2011-2013.

2. Perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai pelaksanaan *corporate governance*, yaitu tentang ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, jumlah rapat dewan direksi, jumlah kepemilikan saham oleh manajerial, jumlah kepemilikan saham oleh pemerintah, dan jumlah kepemilikan saham institusional.

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi. Kapitalisasi pasar adalah harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalikan harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Kapitalisasi pasar dari saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal modal dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan kapitalisasinya, yaitu: kapitalisasi tinggi, kapitalisasi sedang, dan kapitalisasi rendah. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi karena perusahaan yang besar cenderung mempunyai informasi *intellectual capital* yang lebih lengkap.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2003). Data berupa laporan tahunan yang dipublikasikan dapat diperoleh di Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atau di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data empiris berupa sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan (*annual report*), laporan keuangan (*financial report*), dan *fact book*.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda, statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini.

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2011). Nilai rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar dari data yang bersangkutan. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dari data yang bersangkutan.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi uji asumsi klasik. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik dan dapat diterapkan pada model regresi. Pengujian dalam uji asumsi klasik yang

dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Seperti diketahui bahwa uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan melihat grafik histogram dan grafik normal plot (*normal probability plot of regression standardized residual*). Data dikatakan berdistribusi normal apabila data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dan sebaliknya. Selain itu, dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji statistik non-parametrik *kolgomorov-smirnov* (Uji K-S). Uji K-S dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *asympt. Sig (2-tailed)*. Sebelumnya perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yaitu:

Hipotesis Ho : data terdistribusi secara normal

Hipotesis H1 : data tidak terdistribusi secara normal

Apabila nilai probabilitas signifikansi  $>0,05$ , maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas signifikansi  $<0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak ada korelasi antar variabel independennya. Multikolonieritas yang tinggi ditandai dengan nilai  $R^2$  yang sangat tinggi, variabel independen memiliki korelasi diatas 0.90, nilai *tolerance*  $\leq 0.10$  atau dengan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $\geq 10$  (Ghozali, 2011).

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis adalah apabila titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar

kemudian menyempit) maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### **3.5.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan *run test*. *Run test* digunakan sebagai bagian dari statistik *nonparametric* dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2011). Model regresi dikatakan random atau acak jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.

#### **3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (independen) terhadap beberapa variabel terikat

(dependen). Terdapat 2 persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Model 1

$$\text{EICD} = \alpha + \beta_1\text{BSIZE} + \beta_2\text{INDs} + \beta_3\text{FMB} + \beta_4\text{BMEETING} + \beta_5\text{MANOWN} + \beta_6\text{GOVOWN} + \beta_7\text{IOWN} + \beta_8\text{SIZE} + \beta_9\text{ROE} + \beta_{10}\text{LEV} + e$$

2. Model 2

$$\text{QICD} = \alpha + \beta_1\text{BSIZE} + \beta_2\text{INDs} + \beta_3\text{FMB} + \beta_4\text{BMEETING} + \beta_5\text{MANOWN} + \beta_6\text{GOVOWN} + \beta_7\text{IOWN} + \beta_8\text{SIZE} + \beta_9\text{ROE} + \beta_{10}\text{LEV} + e$$

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini terdapat 2 proksi variabel dependen dengan terdapat 2 model, sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) model regresi.

Keterangan:

EICD : Tingkat pengungkapan *intellectual capital*

QICD : Kualitas pengungkapan *intellectual capital*

BSIZE : Jumlah dewan direksi

INDs : Proporsi komisaris independen

FMB : Proporsi hubungan keluarga di dewan

BMEETING : Jumlah rapat dewan direksi

MANOWN : Proporsi kepemilikan manajerial

GOVOWN : Proporsi kepemilikan pemerintah

IOWN : Proporsi kepemilikan institusional

SIZE : Ukuran perusahaan

ROE : Profitabilitas (*Return on Equity*)

LEV : *Leverage*

### **3.5.4 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu uji statistik F, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji statistik t.

#### **3.5.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi akan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Selain dari nilai signifikansinya, model regresi tersebut layak digunakan dengan menilai nilai F, apabila nilai F lebih besar dari 4 maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### **3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Dalam kenyataan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R<sup>2</sup>* negatif, maka dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka *adjusted R<sup>2</sup>* = 1 sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka *adjusted R<sup>2</sup>* =  $(1-k) / (k-n)$ . Jika  $K > 1$ , maka *adjusted R<sup>2</sup>* akan bernilai negatif (Ghozali, 2011).

#### **3.5.4.3 Uji Statistik t**

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,01 ( $\alpha=1\%$ ), 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan 0,10 ( $\alpha=10\%$ ). Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,10 maka hipotesis ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil atau sama dengan 0,10 maka hipotesis tidak dapat ditolak.